

PERAN GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENGEMBANGAN NILAI MORAL PANCASILA SISWA SMK PGRI III SALATIGA

Praptiningsih

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Kabupaten Semarang

E-mail: dra.praptiningsih.msi@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 30 Juli 2020

Diterbitkan Online: 22 Oktober 2020

KATA KUNCI

Peran Guru, Nilai Moral, Pancasila

A B S T R A K

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan guru mata pelajaran PKn dalam pengembangan nilai moral pancasila dan apakah yang menjadi hambatan guru mata pelajaran PKn dalam pengembangan nilai moral pancasila siswa SMK PGRI III Salatiga.

Jenis penelitian ini digunakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara terhadap guru PKn, Guru Agama, dan Kepala Sekolah, dengan satuan analisisnya guru, dengan teknik analisis secara kualitatif deskriptif yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, dengan analisis dan interpretasi/penafsiran terhadap data-data.

Hasil penelitian: 1) peranan guru dalam pengembangan nilai-nilai PKn antara lain: (a) menumbuhkan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan kebesaran ciptaan tuhan. (b) memberi tauladan yang baik dalam keseharian, mengingatkan langsung kepada anak yang baik dan kurang baik dalam kehidupan sehari-hari. (c) memberi tauladan agar selalu kerjasama dan rukun, membiasakan untuk kerjasama dalam bekerja dan belajar, menasehati tentang pentingnya hidup rukun dan bersatu. (d) memberi contoh dengan kepemimpinan yang baik, selalu mementingkan musyawarah, bersikap adil terhadap semua orang. (e) memberi tauladan pentingnya berlaku adil, senantiasa menasehati kepada siswa agar senantiasa bersikap saling menjaga amanah dan selalu bertanggung jawab, memberi penjelasan tentang wawasan nusantara, membiasakan anak untuk saling tolong menolong sesuai kemampuan untuk bersikap adil antar sesama. 2) hambatan guru mata pelajaran PKn, yaitu masih ada siswa yang minat belajar kurang sehingga di rumah malas untuk mempelajari lagi, anak setelah pulang sekolah sulit untuk di pantau, orang tua kurang memperhatikan anaknya karena kesibukannya.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003:3).

Proses pengembangan nilai moral adalah pendidikan yang berlangsung seumur hidup (long live education). Pendidikan nilai moral ini berawal dari keluarga yang dilanjutkan ke lembaga pendidikan formal.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan pembentuk nilai dan sikap bagi anak didik. Oleh karena itu perlunya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada lembaga sekolah memiliki peranan yang sangat penting.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, sekolah, dan orang tua. Pendidikan memegang peranan yang penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya peningkatan sumber daya manusia, maka pemerintah telah berupaya untuk mewujudkannya melalui berbagai usaha pengembangan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan suasana, prasarana pendidikan dan pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya (Depdiknas, 2001).

Dalam rangka menyongsong dan menyiapkan generasi muda yang bernilai moral, berbudi pekerti luhur, kepribadian yang mantap, cinta tanah air dan mempertebal semangat kebangsaan, maka mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat diperlukan. Sekolah merupakan salah satu lembaga yang mengemban tugas mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sekolah dalam hal ini tidak hanya dibebani untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam hal ranah kognitif saja, tetapi juga ranah afektif dan psikomotor.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan tentang nilai-nilai yang sarannya bukan semata-mata pengalihan pengetahuan melainkan lebih ditekankan pada pembentukan sikap. Dengan demikian materi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan titik berat pada ranah afektif.

Pengembangan sikap mental dan perilaku siswa tidak akan terlepas dari penanaman nilai-nilai, dan transfer tentang nilai

itu sendiri. Oleh karena itu guru tidak hanya sekedar sebagai pengajar tetapi harus betul-betul sebagai pendidik yang akan menanamkan dan memindahkan nilai-nilai itu kepada siswanya. Dengan adanya penanaman nilai-nilai itu, maka siswa diharapkan akan tumbuh kesadaran dan kemauan untuk mempraktikkan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi sekolah dapat dikatakan baik, apabila tujuan dari pendidikan itu dikatakan berhasil, yaitu adanya perubahan perilaku moral ke arah yang lebih baik bagi siswa-siswanya.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, warga negara dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai suatu mata pelajaran yang ada dalam kurikulum sekolah Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi yang harus diemban. Diantara misi yang harus diemban sebagai pendidikan dasar untuk mendidik warga negara agar mampu berpikir kritis dan kreatif, mengkritisi, mengembangkan pikiran. Untuk itu semua siswa perlu memiliki kemampuan belajar tepat, menyatakan dan mengeluarkan pendapat, mengenal dan melakukan telaah terhadap permasalahan yang timbul di lingkungan agar tercapai moral/perilaku yang diharapkan.

Namun dalam kenyataan di lapangan, banyak ditemukan berbagai dalam proses belajar mengajar Pendidikan Kewarganegaraan sehingga pembelajaran yang diharapkan tidak tercapai dengan baik. Misalnya para siswa atau lulusan pendidikan telah dikondisikan untuk tidak berani mengemukakan pendapat dan koreksi terhadap kesalahan penguasa. Nilai dan tindakan kreatif semakin terabaikan karena masyarakat termasuk peserta didik hanya dituntut untuk menjadi penurut dan peminta petunjuk.

Dengan situasi seperti ini guru harus dapat mengambil suatu tindakan guna

menyiasati yang terjadi di kelas. Guru harus dapat mengubah strategi agar kemampuan siswa dalam mengeluarkan pendapat semakin meningkat.

Salah satu cara yang dapat ditempuh berkaitan dengan inovasi tugas mengajar guru hendaknya mempunyai kemampuan dalam mengembangkan metode mengajarnya. Metode mengajar diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dipakai oleh guru dalam meyakinkan bahan ajar kepada siswa untuk mencapai tujuan pengajaran. Khususnya dalam hal ini adalah metode untuk menunjang proses belajar mengajar Pendidikan Kewarganegaraan.

Pemilihan metode mengajar ini juga perlu diperhatikan karena tidak semua materi dapat diajarkan dengan hanya satu metode mengajar. Guru hendaknya dapat memilih metode mengajar yang dianggap sesuai dengan materi yang hendak diajarkan. Hal ini dilakukan agar pengajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat berlangsung secara efektif, efisien dan tidak membosankan.

Pendidikan Kewarganegaraan tidak bisa dianggap remeh karena merupakan mata pelajaran yang diwajibkan, sehingga upaya-upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disekolah-sekolah maupun perguruan tinggi harus terus ditingkatkan. Kenyataan di lapangan mata Pendidikan Kewarganegaraan masih dianggap sebagai mata pelajaran nomor dua atau dianggap sepele oleh sebagian besar siswa. Kenyataan ini semakin terlihat manakala metode mengajar yang dipakai oleh sebagian besar guru Pendidikan Kewarganegaraan masih memakai metode konvensional atau tradisional. Metode tradisional merupakan metode dimana guru memegang dalam menentukan isi dan langkah-langkah dalam menyampaikan materi kepada siswa. Sehingga keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengajar berkurang dan hanya bergantung pada guru.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "Peranan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam Pengembangan Nilai Moral Pancasila Siswa SMK PGRI 3 Salatiga”

2. TINJAUAN PUSTAKA

Peran Guru

Dalam lembaga pendidikan, guru memiliki wewenang untuk mengubah dan membentuk sikap dan perilaku anak didik, oleh karena itu guru harus dapat sebagai contoh dan teladan bagi anak didiknya dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sikap terhadap nilai-nilai tertentu terbentuk melalui proses identifikasi yang baik. Hubungan seorang guru dan anak didik hendaknya saling percaya, saling menerima, dan saling menghargai. Dengan demikian nilai-nilai yang dianut oleh guru akan mudah terserap oleh anak didik di sekolah.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah merupakan dasar falsafat Negara Indonesia, sehingga peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan adalah membudayakan Pancasila secara dini, terprogram dan terus menerus dengan penekanan pada pembentukan sikap dan perilaku nyata sehari-hari melalui pendekatan nilai dan pendekatan konsep.

Nilai moral Pancasila yang menjadi objek dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan berhasil dengan baik bila didukung oleh guru-guru yang berkualitas baik dari segi material maupun spiritual, terutama guru Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga sasarannya adalah anak didik yang mempunyai budi pekerti (moral) sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila.

Pendidikan Kewarganegaraan menyangkut masalah pertumbuhan dan pembinaan moral anak didik. Masalah pokoknya adalah bagaimana menumbuhkan moralitas anak didik, yaitu agar berkembang kearah nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai itu diwujudkan dalam sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kemampuan guru Pendidikan Kewarganegaraan

dalam menumbuhkan moral anak didik. Oleh karena itu seorang guru Pendidikan Kewarganegaraan harus memenuhi kriteria tersendiri. Kriteria guru menurut Nurul Zuriyah (2008:117) adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai keyakinan terhadap kebenaran Pancasila, baik sebagai pandangan hidup maupun sebagai dasar negara.
- 2) Mempunyai sikap hidup dan bertingkah laku sebagai manusia Pancasila.
- 3) Memiliki penghayatan yang benar mengenai Pancasila, UUD 1945, GBHN dan bahan penunjang lainnya.
- 4) Menguasai keterampilan mendidik, dan menguasai metode yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap.
- 5) Hubungan antara guru dan anak didik didasarkan atas kekeluargaan, keakraban serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan serta keserasian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.
- 6) Mampu memilih dan menggunakan instrument evaluasi sikap.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan guru adalah merupakan tugas utama yang harus dilaksanakan oleh guru dalam rangka kegiatan mengajar serta mendidik kepada siswa-siswinya yang memiliki kemampuan profesional, memiliki intelektual, dan memiliki sifat edukasi sosial.

Nilai Moral Pancasila

Nilai mengandung arti sesuatu yang berharga bagi seseorang dan biasanya mengacu pada aturan dari perbuatan yang terarah, adil dan benar (Linda, 1999:14 dalam Nurul Zuriyah). Nilai adalah standar perbuatan dan sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup dan bagaimana kita memperlakukan orang lain.

Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Perilaku moral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai penuh keteraturan, ketertiban dan keharmonisan.

Dalam mengajarkan pengetahuan moral, seorang guru harus memahami tahap-tahap perkembangan moral seseorang. Menurut Lawrence Kohlberg dalam (Asrori, 2007:156 dalam Nurul Zuriyah) tahap perkembangan moral terjadi dalam tahapan yang bergerak maju dan tarafnya semakin meningkat/tinggi.

Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri, dan nilai objektif karena nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kenyataan umum atau universal.

Berdasarkan beberapa uraian tentang nilai, moral dan Pancasila, maka dapat disimpulkan bahwa nilai mengandung arti sesuatu yang berharga bagi diri seseorang yang merupakan keharusan untuk diwujudkan dalam tingkah laku kehidupan manusia. Sedang moral adalah keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, sehingga manusia hidup tidak boleh meninggalkan norma-norma yang ada di masyarakat misalnya norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, kebiasaan, dan norma hukum, dan Pancasila adalah sebagai ideologi bagi negara Indonesia, yang merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi nilai moral Pancasila disini adalah nilai moral Pancasila yang diajarkan kepada peserta didik melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang menampilkan program dan pola kegiatan belajar mengajar yang mengacu pada aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor, dan mengembangkan pendidikan nilai.

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral tersebut diharapkan dapat terwujud dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari anak didik, baik sebagai individu maupun sebagai

anggota masyarakat dan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.

Dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan salah satu ruang lingkupnya adalah norma, hukum dan peraturan yang meliputi: tata tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional. Salah satu kompetensi dasarnya adalah siswa diharapkan mampu menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah merupakan salah satu mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan nilai, yaitu mata pelajaran yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila atau budaya bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Pelaksanaan pendidikan nilai di sekolah (dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan) selain dapat melalui taksonomi Bloom (kognitif, psikomotorik, dan afektif) juga dapat dilakukan melalui jenjang afektif yang dikemukakan oleh Kratzwol dalam (Ruminiati, 2007:30 dalam Nurul Zuriyah) antara lain berupa penerimaan nilai, penanggapan nilai, penghargaan nilai, pengorganisasian nilai, dan karakterisasi nilai.

Konsep lain masalah nilai adalah konsep moral, menurut (Soenarjati, 1989:25 dalam Nurul Zuriyah) dalam perkembangan moral diartikan sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik, yang susila, moral adalah berkenaan dengan kesusilaan. Jadi seseorang individu (siswa) dapat dikatakan baik secara moral atau bermoral apabila bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah moral yang ada. Sebaliknya jika perilaku individu (siswa) itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, maka ia akan dikatakan jelek secara moral.

1) Hambatan Penanaman Nilai Moral.

Penanaman nilai moral yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak terlepas dari hambatan yang ada. Menurut Ruminiati, (2007:31) kendala tersebut dapat berupa hambatan internal dan hambatan eksternal.

Hambatan internal adalah kendala yang datang dari dalam diri guru sedang hambatan eksternal dalam penanaman nilai moral kepada siswa adalah hambatan yang datang dari lingkungan.

2) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Nilai Mora

Faktor-faktor yang mempengaruhi tentang penanaman nilai moral kepada peserta didik (siswa) menurut Nurul Zuriyah (2008:145-146) antara lain adalah sebagai berikut: (1). faktor keluarga, (2). faktor kematangan anak, (3). faktor sosial ekonomi, (4). faktor pendidikan, dan faktor kapasitas mental, emosi dan intelegansi.

a) Faktor keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan moralnya dan dalam keluarga berlaku norma-norma kehidupan keluarga. Dengan demikian pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan anak.

b) Faktor kematangan anak.

Untuk mampu mempertimbangkan dalam proses penerapan nilai moral, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional.

c) Faktor sosial ekonomi.

Kehidupan anak banyak dipengaruhi oleh kondisi dan status sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak, bukan sebagai anak yang independent akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Secara tidak langsung dalam pergaulan anak, masyarakat

akan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya.

d) Faktor pendidikan.

Penanaman nilai moral perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang dibelajar di lembaga pendidikan (sekolah). Kepada peserta didik harus dikenalkan norma-norma lingkungan dekat, norma kehidupan, dan etik pergaulan dalam perilaku bermasyarakat dan bernegara.

e) Faktor kapasitas mental, emosi dan intelegensi.

Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan bahasa secara baik, dan pengendalian emosional secara seimbang akan menentukan dalam perkembangan moral anak didik tersebut.

3) *Teori penanaman moral pada peserta didik.*

Menurut Kohlberg (1976:48) dalam Nurul Zuriah mengatakan bahwa pengembangan moral didasarkan pada 3 (tiga) jenis teori yang dikemukakan oleh pakar penelitian psikologi dan kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

a) Teori pengembangan kognitif.

Teori ini dipelopori oleh Piaget, yang prinsipnya bahwa perkembangan moral seseorang melalui pola konsep tahapan secara berurutan mengalami perkembangan sikap seiring dengan penambahan usia. Asumsi yang dikemukakan adalah perkembangan moral berlandaskan susunan kognitif atau unsur keputusan moral, norma moral tersusun melalui pengalaman interaksi sosial, bukan penghayatan peraturan, dan perkembangan moral lebih disebabkan pengaruh lingkungan bukan karena kekhususan keluarga, bertindak disiplin, dan mendapat hukuman atau ganjaran.

b) Teori sosialisasi.

Teori sosialisasi dirintis oleh Whiting dan Child dengan mengemukakan asumsi bahwa; perkembangan moral adalah pertumbuhan perilaku dan ranah afektif yang disesuaikan dengan aturan-aturan moral, perkembangan moral secara relatif dipengaruhi oleh budaya, dan norma moral adalah penghayatan peraturan budaya dari luar diri seseorang.

c) Teori psikoanalitik.

Teori ini dikemukakan oleh Freud yang berasumsi bahwa mengenai perkembangan nilai moral sebagai proses penghayatan budaya atau norma orangtua, tekanan asumsi teori ini terletak pada penghayatan.

4) *Cara penanaman nilai moral.*

Penanaman nilai moral sebenarnya bukan hanya dimonopoli oleh mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, artinya setiap mata pelajaran dapat menyisipkan nilai-nilai moral kepada anak didiknya. Namun demikian sebagian orang sudah menganggap bahwa mendidik anak memiliki moralitas yang baik merupakan salah satu tanggungjawab yang harus diemban, oleh mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu tanggungjawab yang besar terpikul oleh mata pelajaran ini dalam menanamkan nilai moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu diperlukan langkah yang tepat dalam menanamkan nilai moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Dalam rangka menanamkan nilai moral kepada peserta didik, maka perlu dijabarkan secara spesifik oleh masing-masing guru. Misalnya dalam menanamkan nilai moral kepada siswa, seorang guru dapat memasukkan cara, mendisiplinkan siswa ke dalam proses pembelajaran dengan tetap memperhatikan tata tertib sekolah Sebagai acuan. Sehingga apa yang dilakukan oleh guru tidak berseberangan dengan apa yang ditemukan oleh sekolah. Begitu pula

ketika memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, maka guru harus, tetap memperhatikan ketentuan yang telah dibuat sekolah.

3. METODOLOGI

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Bentuk ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan informasi aktual yang bersumber dari data lisan dan tulisan serta tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang atau subjek itu sendiri. Melalui jenis penelitian ini diharapkan dapat mengetahui peranan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan nilai moral Pancasila siswa SMK PGRI 3 Salatiga.

Lokasi penelitian merupakan objek dan sumber data di mana tempat diperolehnya informasi yang diperlukan dari masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di SMK PGRI 3 Salatiga dikarenakan peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang peranan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan nilai moral Pancasila terhadap siswa. Jumlah guru di SMK PGRI 3 Salatiga ada 20 (dua puluh) orang dan jumlah siswa tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) siswa.

Adapun teknik yang dipergunakan adalah melalui wawancara dan angket. Satuan analisis dalam penelitian ini adalah peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dan para siswa di SMK PGRI 3 Salatiga. Dalam penelitian ini satuan pengamatan adalah Guru Pendidikan Kewarganegaraan dan anak didik (siswa). Sumber informasi dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Kewarganegaraan, guru Agama, dan Kepala Sekolah di SMK PGRI 3 Salatiga.

Setelah semua data-data dan bahan-bahan keterangan telah diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan studi lapangan, maka tindakan selanjutnya adalah suatu analisis data. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam pola-pola kategori uraian dasar. Dalam penelitian ini

teknik analisis data menggunakan teknik data kualitatif yang dilakukan secara diskriptif dengan metode analisis konteks. Teknik analisis data ini melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu melalui kategori data, interpretasi data, dan tahap pengambilan simpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Guru memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan, guru mempunyai tugas utama yang harus dilaksanakan oleh guru dalam rangka kegiatan mengajar dan mendidik kepada siswa siswinya serta mendorong, membimbing, mengarahkan dan memberikan fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan pendidikan.

Salah satu tugas guru adalah memberikan pelayanan kepada siswa agar mereka menjadi peserta didik yang selaras dengan tujuan sekolah. Guru merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya proses belajar, dan guru harus menguasai prinsip-prinsip belajar, guru harus menciptakan suatu kondisi belajar yang sebaik-baiknya.

Peranan guru dalam pengembangan dan penanaman nilai moral pendidikan kewarganegaraan kepada siswa sebenarnya bukan hanya menjadi tanggungjawab guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, artinya setiap mata pelajaran dapat menyisipkan nilai-nilai moral kepada siswa. Namun demikian sebagian orang sudah menganggap bahwa mendidik siswa harus memiliki moralitas yang baik merupakan salah satu tanggungjawab yang diemban oleh guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu tanggungjawab yang besar menjadi beban dalam mata pelajaran ini.

Pendidikan nilai moral yang diterapkan oleh guru melalui penyampaian materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam penyampaian materi ini guru memberikan contoh sikap perilaku yang baik, memberikan nasehat, memberikan anjuran, memberikan larangan, serta bersama-sama dengan siswa untuk membiasakan dengan penerapan nilai-

nilai moral pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah maupun dalam kehidupan bermasyarakat

Dari hasil wawancara peneliti dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan, Guru Agama, Kepala Sekolah SMK PGRI 3. Diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam mengembangkan keyakinan siswa terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa beserta sifat-sifatnya yang Maha Sempurna di SMK PGRI 3 guru Pendidikan Kewarganegaraan menanamkan sikap dan perilaku sesuai dengan pancasila bersikap jujur, demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menghormati sesama pemeluk agama/toleransi.

Menurut kepala sekolah mengembangkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menganjurkan dan mengecek kegiatan keagamaan secara langsung melalui ibadah fardhu dan sunnah, memberi fasilitas keagamaan kepada orang tua/wali. Sedang menurut guru agama anak-anak di ajak untuk mengakui bahwa kita memiliki kebebasan dalam beragama.

b. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai moral kepada siswa tentang adanya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya tentang martabat manusia yaitu dengan memberi pengertian kepada siswa untuk saling membantu sesamanya, dengan mengajak temannya apabila ada teman yang sakit untuk dijenguk, saling tolong-menolong dengan sesamanya. Dengan adanya pengakuan martabat manusia ini siswa diharapkan mampu berpikir objektif dan mampu menghargai diri sendiri dan orang lain. Misalnya, setelah diberi penjelasan guru tentang nilai-nilai martabat manusia, siswa yang dulu tidak menghargai gurunya dengan sadar mereka akan menghargai dan menghormati guru-gurunya.

Menurut pendapat Kepala Sekolah bahwa untuk mewujudkan tentang adanya pengembangan martabat manusia yaitu memberi tauladan yang baik dalam keseharian, mengingatkan langsung kepada anak yang baik dan kurang baik berperilaku sehari-hari dan menurut guru agama mengatakan bahwa dengan memerintahkan siswa, membiasakan untuk tidak membedakan suku agama, warna kulit, tingkat ekonomi ataupun tingkat pendidikan, membiasakan kepada anak-anak untuk bersikap adil dan membela yang benar dan menyadari bahwa kita memiliki hak dan kewajiban bersama. Selanjutnya bahwa cara guru mengembangkan nilai-nilai moral kepada siswa tentang sikap dan perilaku dalam hubungan diri sendiri, telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan guru Pendidikan Kewarganegaraan telah memberi contoh atau teladan kepada siswanya.

c. Nilai Persatuan Indonesia

Peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan tentang nilai Persatuan Indonesia. Guru membiasakan untuk cinta agama, tanah air, bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara. Selanjutnya menurut kepala sekolah memberi teladan agar selalu kerja sama dan rukun, membiasakan untuk kerja sama dalam belajar, menasehati pentingnya hidup rukun dan bersatu.

Guru juga memberikan penjelasan tentang pentingnya persatuan dengan menanamkan keyakinan bahwa siswa sebagai warga negara walaupun beda agama, budaya, ras, golongan, bahasa tetapi tetap bersaudara dan bersatu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut guru agama membiasakan anak untuk cinta agama, cinta tanah air bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara.

d. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan tentang nilai kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan kepada siswa bahwa guru memberi informai sebagai warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, bahwa siswa sebagai warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban, mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai guru Pendidikan Kewarganegaraan menjelaskan bahwa kita sebagai rakyat harus mentaati peraturan perundangan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan jika ada perselisihan atau beda pendapat harus diselesaikan dengan melalui musyawarah.

Bahwa nilai-nilai moral tentang kedaulatan adalah ditangan rakyat, sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama yang telah diterangkan oleh guru sudah dapat berjalan dengan baik memberi pengertian kepada siswa harus mentaati peraturan yang ada.

Sedangkan menurut kepala sekolah dalam mengembangkan tentang sila ke empat ini misalnya memberi contoh dengan kepemimpinan yang baik, mementingkan musyawarah, bersikap adil terhadap semua orang. Selanjutnya menurut guru agama untuk menumbuhkan keyakinan, kepada siswa tentang kedudukan membiasakan untuk belajar mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri.

e. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan tentang nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam keadilan sosial, yaitu guru dengan memberikan penjelasan dalam hubungannya dengan masyarakat dan bangsa, misalnya memberi penjelasan tentang ideologi yang diperbolehkan oleh negara. Kita sebagai warga negara yang menganut ideologi pancasila juga harus bisa menghormati hak orang lain, harus cinta akan kemajuan dan pembangunan dalam

hubungannya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia, guru juga memberi penjelasan tentang materi wawasan nusantara kepada para siswa.

Sedang bahwa nilai keadilan sosial sila kelima dalam pancasila sudah dapat mengembangkan dan menumbuhkan nilai-nilai moral keadilan sosial, walaupun dalam praktiknya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena keadilan adalah bersifat relatif dan sulit cara mengukur tentang keadilan itu sendiri.

Menurut kepala sekolah untuk mengembangkan tentang nilai moral dalam menghormati orang lain, cinta kemajuan dan pembangunan yaitu memberi contoh dengan kepemimpinan yang baik, selalu mementingkan musyawarah, bersikap adil terhadap semua orang.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh sebagaimana tersebut di atas bahwa peranan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan nilai-nilai moral Pancasila siswa SMK PGRI 3 Salatiga sudah dapat mendorong siswa untuk meningkatkan nilai-nilai moral yang ada dalam Pancasila, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan nilai-nilai moral tersebut guru dapat menekankan penanaman nilai-nilai moral yang ada dalam Pancasila, yaitu sebagai berikut:

a. Nilai Ketubanan Yang Maha Esa.

Peranan guru adalah dengan menumbuhkan keyakinan kepada siswa untuk mengenal kepada Tuhannya, misalnya mengingat Tuhan, berdo'a dan berserah diri tawakal pada Tuhan-Nya bahwa apa yang dilakukan oleh manusia di dunia, Tuhan pasti mengetahuinya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat User Usman bahwa guru sangat berperan dalam meningkatkan keyakinan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Mahn Esa. Peran guru antara lain sebagai berikut : guru

sebagai contoh/teladan sikap perilakunya yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan, guru menentukan hasil belajar yang dicapai siswa, karena siswa mau berdo'a dan menjauhi larangan Tuhan (Uzer Usman, 1995:1).

b. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradap.

Peran guru dalam pengakuan terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradap, misal martabat manusia dengan memberi pengertian saling membantu sesamanya, saling tolong-menolong dengan sesamanya, menghargai pendapat dan keberadaan orang lain. Hal ini juga sesuai pendapat Muhammad Suad bahwa setup manusia harus mempunyai jati diri dan harga diri, sebab dengan jati diri dan harga diri seseorang akan mampu menghargai diri sendiri dan orang lain.

c. Nilai Persatuan Indonesia.

Peran guru dalam mengembangkan nilai persatuan Indonesia kepada para siswa, guru sangat berperan misal perilaku baik hati, sifat terpuji, demokratis menghargai pendapat orang lain. Tidak suka memihak kepada kelompok tertentu, membagi hak sesuai porsi masing-masing. Hal ini sesuai pendapat (Uzer Usman 1995:5) bahwa dalam pengembangan sifat keadilan dan terpuji, yaitu, dengan menerapkan sifat sabar, demokratis dan menghargai pendapat orang lain. Dalam hal ini siswa dapat mengedarkan segala sesuatu tidak dengan tergesa-gesa tetapi dengan penuh ketelitian dan kesabaran.

d. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Peranan guru dalam mengembangkan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan kepada siswa bahwa sebagai warganegara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama bahwa nilai-nilai moral tentang kedaulatan adalah ditangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bahkan dihadapan luakumpan harus diperlakukan sama, misalnya tidak

memaksakan pemikiran, keyakinan dan kebiasaannya sendiri.

e. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Guru berperan mengajak para siswa agar mengembangkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia misalnya harus bisa menghormati hak orang lain, harus cinta akan kemajuan dan pembangunan dalam hubungannya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia dengan menunjukkan kebanggaan dan kecintaan terhadap tanah air. Contoh menghargai jasa para tokoh/pahlawan nasional, mengbargai keindahan alam dan budaya Indonesia.

Dari kelima tentang pengembangan nilai-nilai moral Pancasila kepada siswa sebagaimana telah diuraikan di atas telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kohlberg dalam Nurul Zuriah bahwa dalam pengembangan nilai-nilai moral didasarkan pada 3 (tiga) jenis teori, yaitu teori pengembangan kognitif, teori sosialisasi, dan teori psikoanalitik. Teori pengembangan kognitif berlandaskan bahwa peningkatan nilai moral tersusun melalui pengalaman interaksi sosial, bukan penghayatan peraturan tetapi lebih disebabkan pengaruh lingkungan.

Hambatan Guru Mara Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Hambatan guru dalam pengembangan nilai-nilai moral datang dari dalam diri seorang guru berupa inkonsistensi dalam, melakukan atau menerapkan aturan. Ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh guru dalam pengembangan nilai terjadi ketika guru Pendidikan Kewarganegaraan menjadi model atau contoh dalam menjalankan sikap disiplin, tata tertib di sekolah.

Hambatan yang lain orangtua sibuk dengan pekerjanya sehingga anak kurang mendapat perhatian, serta diluar sekolah siswa bisa mengakses berbagai informasi lewat media elektronik yang tidak terkendali dan sulit untuk dipantau oleh orangtuanya siswa malas untuk

belajar, dan siswa banyak bermain dan sedikit belajar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa peranan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan nilai-nilai moral Pancasila siswa SMK PGRI 3 Salatiga sangat dominan dan berpengaruh terhadap perkembangan sikap, perilaku, moral siswa yang bersangkutan.

Masih ada siswa yang minat belajarnya kurang sehingga dirumah malas untuk mempelajari lagi. Anak setelah pulang sekolah sulit untuk dipantau dan ada orang tua kurang memperhatikan anaknya karena kesibukannya.

Usaha guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan nilai-nilai moral kepada para siswa misalnya dengan cara memasukan nilai kedisiplinan dalam pembelajaran. Melalui kedisiplinan seseorang akan mencapai prestasi sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arikunto, Suharsini. (1993). *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [2] Asrori, Muhammad. (2007). *Psikologi Pembelajaran*. Bandung: CV.Wacana Prima.
- [3] Burgin, B. (2002). *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep, Strategi dan , APhkasi*. Jakarta: Grasindo.
- [4] Daradjat, Zakiah. (1992). *Kepribadian Guru*. Jakarta: Bulan Bintang.
- [5] Daryanto. (2009). *Panduan Proses Pembelajaran Kreatif & Inovatif*. Jakarta: AV. Publisier.
- [6] Mohamad Arifi & Barnawi. (2012). *Kinerja Guru Profesional*. Jakarta: Ar-Razz Media.

- [7] Poerwanto, WJS. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- [8] Rachmawati, Tutik. (2013). *Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka Kreditnya*. Yogyakarta: Gava Media.
- [9] Salama. (1997). *Peran Orangtua Dalam Pendidikan Anak Jakarta*: Erlangga.
- Sardinian. (1990). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Press.
- [10] Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.